

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guru merupakan tenaga pengajar yang dapat menuntun para tunas bangsa dalam mempersiapkan mental para pemuda dalam menyokong negeri ini dalam beberapa puluh tahun kedepan. Di masa – masa sekarang ini kita membutuhkan para guru yang memiliki kualitas mengajar memadai serta memiliki integritas tinggi dalam pemenuhan kewajibannya dalam mengajar para tunas bangsa kita.

Di Indonesia sendiri, dalam hal pendidikan masih bisa dikatakan kurang, akibat kurangnya tenaga pengajar yang memadai serta kurangnya kesadaran para orang tua dalam hal pendidikan anak mereka.

Agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa lebih maju lagi, maka dibutuhkan penghargaan kepada para tenaga pengajar dalam pemenuhan tugas mereka, yaitu dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan proporsi usaha yang telah mereka lakukan. Dalam hal penghasilan yang diterima oleh para guru tersebut, negara juga memajaki sebagian besar penghasilan mereka untuk dijadikan sebagai penerimaan Negara kita.

Dimana sumber pendapatan negara yang paling besar didapat dari sektor pajak. Sumber pendapatan dari pajak itu dibagi lagi menjadi 7 sektor, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

Untuk pajak yang dikenakan kepada para tenaga pengajar masuk kedalam penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan tepatnya PPh pasal 21 untuk Orang Pribadi.

PPh Pasal 21 dikenakan kepada setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki penghasilan diatas PTKP. Dimana, PTKP merupakan jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak, sehingga yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak adalah penghasilan yang jumlahnya berada di atas PTKP.

PTKP untuk setiap WPOP adalah senilai 54 juta rupiah, sedangkan untuk tambahan PTKP untuk orang pribadi yang sudah menikah adalah senilai 4,5 juta rupiah dan juga tambahan PTKP untuk tanggungan adalah sebesar Rp. 4,5 juta per tanggungannya dimaaa maksimal tanggungan adalah sebanyak 3 orang tanggungan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap pajak penghasilan guru-guru di SMA Negeri 1 Laubaleng serta hendak mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan guru-guru di SMA Negeri 1 Lau Baleng dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehubungan hal tersebut, KTTA ini mengangkat judul “Tinjauan Pajak Penghasilan Guru di SMA Negeri 1 LauBaleng”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman para guru SMA Negeri 1 Lau Baleng terhadap pajak penghasilan?
2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan para guru SMA Negeri 1 Lau Baleng dalam pelaporan SPT Tahunan?
3. Berapakah rata-rata pajak penghasilan yang disetor oleh para guru di SMA Negeri 1 Lau Baleng?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat pemahaman para guru SMA Negeri 1 Lau Baleng terhadap pajak penghasilan pasal 21
2. Menganalisis tingkat kepatuhan para guru SMA Negeri 1 Lau Baleng dalam pelaporan SPT Tahunan
3. Menganalisis rata-rata pajak penghasilan yang disetor oleh para guru di SMA Negeri 1 Lau Baleng

1.4 Ruang Lingkup

Dalam KTTA ini, penulis membuat batasan ruang lingkup atas penulisannya pada Peninjauan terhadap Pajak Penghasilan para guru di SMA Negeri 1 Lau Baleng

Penulis juga hendak menganalisis rata-rata pajak penghasilan yang disetorkan para guru SMA Negeri 1 Lau Baleng, serta mengetahui pula tingkat kepatuhan para guru SMA Negeri 1 Lau Baleng dalam hal pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penulisan

Dari sisi penulis, karya tulis akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait sistem perpajakan serta menambah wawasan dan pengalaman untuk pendidikan, serta sebagai penambah pengalaman dalam praktik lapangan melalui teori yang dipelajari penulis.

Dari sisi pihak para guru, penulis berharap bahwa dengan tulisan ini para guru di SMA Negeri 1 Lau Baleng mulai sadar dan patuh dalam hal memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penjelasan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini diisi dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai dasar pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode terkait pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dan juga berisi pembahasan dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini..

BAB IV SIMPULAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan atas pembahasan yang telah disajikan dalam penyusunan KTTA.